



## Mengukur *Social Transfer In Kind* (STIK) dan Kontribusinya Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tanggadi Sulawesi Barat Tahun 2011-2017

Didiq Rosadi Ali<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik

### Informasi Artikel

Sejarah artikel:  
Diterima Januari 2019  
Disetujui Oktober 2019  
Dipublikasikan Oktober 2019

Keywords:  
*Disposable Income,*  
*Government,*  
*NPISH,*  
*STIK,*  
*West Sulawesi*

### ABSTRACT

*Disposable income (Disposable Income) is considered not enough anymore to be used to measure and compare the welfare level of a region. This is because the disposable income indicators do not accommodate the effects of social transfers in Kind (STIK) of goods and services provided by the Government and Non-Profit Institutions Serving for Households (NPISH). Therefore, a growing number of statistical institutions and economists recommend doing STIK calculations and adding them to the portion of household income to create more accurate new income measures. The problem is, the measurement of social transfers (STIK) has not been done much yet and there is no similar research yet conducted in Indonesia. This study aims to (1) provide alternative STIK calculations with the new method of the West Sulawesi Gross Regional Domestic Product (GRDP) component, and (2) Assess the STIK efficiency level in supporting household economies in West Sulawesi. The results of this study indicate that the total value of STIK in West Sulawesi in 2011-2017 ranged from 1.30 to 1.98 trillion rupiahs. In addition, districts with STIK highest efficiency levels in providing additional allocations to household consumption expenditures which are calculated through the proportion of STIK to total final household consumption expenditure are Mamuju Regency with a percentage of 18.8 percent.*

© 2019 MediaTrend

Penulis korespondensi:  
E-mail: [didiq.ra@bps.go.id](mailto:didiq.ra@bps.go.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.4845>  
2460-7649 © 2019 MediaTrend. All rights reserved.

## PENDAHULUAN

Pengukuran tingkat ekonomi harus mulai dialihkan dari pengukuran ekonomi berbasis produksi menjadi pengukuran berdasarkan tingkat kesejahteraan manusia (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009). Tingkat kesejahteraan dari beberapa wilayah menggunakan indikator *disposable income*. Definisi *disposable income* yaitu pendapatan individu setelah dikurangi pajak pendapatan perseorangan (Persaulian, Aimon, & Anis, 2013). Dalam sumber yang sama disebutkan bahwa, menggunakan *disposable income* sebagai ukuran langsung dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar wilayah dianggap tidak lagi cukup. Hal ini disebabkan oleh karena indikator *disposable income* ini tidak mengakomodir dampak transfer sosial dalam berbagai bentuk (*Social Transfer In Kind-STIK*) baik barang maupun jasa yang disediakan oleh sektor publik.

Mengakomodir STIK sangatlah penting jika sebuah analisis perekonomian seperti distribusi pendapatan serta tingkat kemiskinan dibuat untuk perbandingan tingkat kesejahteraan wilayah. Hal ini dikarenakan dalam suatu negara A misalkan, layanan tertentu sebagian besar mungkin disediakan oleh negara dan bebas digunakan oleh siapapun dalam negara tersebut. Negara B perlu membayar layanan tersebut secara langsung/tunai. Hal ini berarti, jika semua faktor dianggap sama (*ceteris paribus*) meskipun *disposable income* di kedua negara sama, maka Negara A akan memiliki standar hidup yang lebih tinggi daripada negara B (Tonkin, Antonopoulos, & Webber, 2014).

Sejalan dengan hal itu, pengukuran atau penghitungan STIK adalah salah satu topik yang dianggap paling penting untuk dilakukan dalam hubungannya dengan konsep distribusi pendapatan (Schwahn, 2014). Menurut *The Canberra Group Handbook* tentang Statistik Pendapatan Rumah Tangga (2011), dalam penghitungan ekonomi direkomendasikan untuk

menambahkan nilai transfer sosial (STIK) ke dalam pendapatan rumah tangga yang siap dibelanjakan (*disposable income*) untuk menciptakan ukuran pendapatan yang telah disesuaikan (*adjusted income*) agar diperoleh hasil yang lebih relevan dan akurat.

Masalahnya, hingga sekarang penghitungan STIK masih sangat terbatas dilakukan (Schwahn, 2014). Sebab, menurut Komunitas statistik masih sulit untuk menentukan cara penilaian dan alokasi STIK bagi setiap rumah tangga. Selain itu, konsep serta definisi dalam menentukan metodologi yang tepat juga masih dianggap sangat terbatas, sehingga diperlukan berbagai macam penelitian sebagai referensi dalam menghitung STIK ini. Penelitian tentang penghitungan nilai STIK belum dilakukan di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk: (1) Memberikan alternatif penghitungan besaran nilai STIK dengan metode baru dari komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Barat; (2) Menilai tingkat efisiensi STIK dalam menopang perekonomian rumah tangga di Sulawesi Barat.

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data series waktu (*time series*) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Barat tahun 2011-2017 dari sisi pengeluaran. Perkembangan PDRB setiap periode menjelaskan perkembangan PDRB oleh adanya perubahan komponen sisi pengeluaran (Fitriani, Rusgiyono, & Wuryandari, 2013). Data tersebut kemudian diuraikan dengan memilih komponen PDRB pengeluaran yaitu konsumsi pemerintah menjadi sub komponen pengeluaran pemerintah khusus untuk individu serta komponen total pengeluaran konsumsi lembaga *non profit* yang melayani rumah tangga (LNPRRT). Selain itu, data yang digunakan bukan hanya data agregasi PDRB Provinsi Sulawesi Barat

secara keseluruhan tetapi juga menggunakan data PDRB 6 (enam) kabupaten yang ada di Sulawesi Barat agar diperoleh estimasi nilai *Social Transfer In Kind* (STIK) yang lebih rinci dan dapat diperbandingkan antar waktu dan antar daerah.

Penelitian ini menggunakan data PDRB Sulawesi Barat untuk mengestimasi nilai STIK baik secara agregat di Provinsi Sulawesi Barat, maupun masing-masing kabupaten yang ada. Nilai estimasi STIK tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif menggunakan ilustrasi tabel dan grafik dalam penyampaian.

Dalam mengestimasi nilai STIK tersebut di atas, digunakan pendekatan berdasarkan dengan persamaan sebagai berikut:

- (1)  $Y \text{ income} = Y \text{ expenditure}$ , sehingga;
- (2)  $\text{Disposable income} = \text{Total pengeluaran konsumsi akhir}$

dengan menambahkan variabel STIK di kedua sisi persamaan, maka diperoleh hasil:

- (3)  $\text{Disposable income} + \text{STIK} = \text{Total pengeluaran konsumsi akhir} + \text{STIK}$
- (4)  $\text{Adjusted disposable income} = \text{Total pengeluaran konsumsi aktual}$

Analog dengan itu, jika dibawa pada konsep yang lebih mikro yaitu berfokus pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- (5)  $\text{Disposable income rumah tangga} + \text{STIK} = \text{Total PKRT akhir} + \text{STIK}$
- (6)  $\text{Adjusted disposable income rumah tangga} = \text{Total PKRT Aktual}$

Sementara itu, STIK diperoleh dari total pengeluaran konsumsi pemerintah khusus untuk individu dan total pengeluaran LN-PRT dengan formulasi sebagai berikut:

- (7)  $\text{STIK} = \text{Total Pengeluaran Pemerintah untuk individu} + \text{Total Pengeluaran konsumsi LN-PRT}$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tinjauan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pengeluaran, perekonomian Sulawesi Barat masih ditopang sangat dominan oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jika ditinjau lebih rinci menurut kabupaten, fenomena yang sama juga terjadi dimana komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga juga menjadi komponen paling dominan dengan peran lebih dari 50 persen dari total ekonomi kecuali Kabupaten Mamuju Utara.

Berdasarkan Tabel 1, pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) akhir provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2017 memiliki tren meningkat dari 12,19 triliun rupiah pada tahun 2011 hingga mencapai 16,61 triliun pada tahun 2017 dengan nilai pertumbuhan pada selang 4,22-5,45 persen. Pertumbuhan PKRT akhir tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai 5,45 persen sementara yang terendah pada tahun 2011 sebesar 4,22 persen. Ditinjau lebih rinci menurut kabupaten, jika diurutkan berdasarkan total PKRT akhir sepanjang tahun 2011-2017, skala ekonomi terbesar berturut-turut dimiliki oleh Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan PKRT akhir tertinggi tahun 2011-2017 dimiliki oleh Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar 6,82 persen pada tahun 2013 dan yang terendah adalah Kabupaten Mamasa sebesar 3,9 persen pada tahun 2011.

**Tabel 1.**  
**Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Sulawesi Barat menurut Kabupaten Tahun 2011-2017 (juta rupiah)**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	PKRT akhir						
<b>Sulawesi Barat</b>	10,894,524	11,442,623	12,066,567	12,651,767	13,290,329	13,949,317	14,634,301
<b>01 Majene</b>	1,432,108	1,496,346	1,575,950	1,652,481	1,732,302	1,820,738	1,907,009
<b>02 Polewali Mandar</b>	3,526,170	3,707,620	3,960,368	4,167,146	4,395,848	4,657,135	4,935,074
<b>03 Mamasa</b>	963,473	1,004,781	1,058,048	1,103,774	1,154,133	1,204,416	1,265,817
<b>04 Mamuju</b>	2,682,247	2,821,400	2,998,615	3,145,704	3,342,784	3,514,242	3,693,426
<b>05 Mamuju Utara</b>	1,373,277	1,438,665	1,518,051	1,585,839	1,665,812	1,745,315	1,825,914
<b>06 Mamuju Tengah</b>	918,954	963,670	1,003,864	1,051,638	1,097,207	1,152,401	1,204,957

Setelah menambahkan kontribusi pemerintah dan lembaga *non profit* yang melayani rumah tangga yang dinilai dalam bentuk nominal rupiah pada PKRT akhir, didapatkan hasil sebagai berikut:

rumah tangga yang selanjutnya disebut sebagai nilai *Social Transfer In Kind* (STIK). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai STIK total untuk Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat dari sekitar 1,3 triliun rupiah

**Tabel 2.**  
**Pengeluaran Konsumsi Aktual Rumah Tangga Sulawesi Barat menurut Kabupaten Tahun 2011-2017 (juta rupiah)**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	PKRT akhir						
<b>Sulawesi Barat</b>	12,193,821	13,185,622	13,705,476	14,396,196	15,218,853	15,922,043	16,613,993
<b>01 Majene</b>	1,685,690	1,797,527	1,856,113	1,952,301	2,069,485	2,165,803	2,252,873
<b>02 Polewali Mandar</b>	3,842,456	4,146,485	4,375,614	4,636,550	4,880,293	5,145,349	5,484,225
<b>03 Mamasa</b>	1,164,628	1,211,311	1,254,211	1,292,800	1,359,059	1,405,918	1,456,709
<b>04 Mamuju</b>	3,010,462	3,428,252	3,561,066	3,744,766	4,040,420	4,239,047	4,371,077
<b>05 Mamuju Utara</b>	1,495,052	1,558,867	1,630,197	1,711,199	1,792,360	1,893,313	1,979,877
<b>06 Mamuju Tengah</b>	996,738	1,032,840	1,075,767	1,113,397	1,162,624	1,221,487	1,271,533

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diatas, nilai PKRT yang dibentuk disebut sebagai nilai PKRT yang disesuaikan (PKRT *adjusted*). Nilai PKRT *Adjusted* tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi seiring dengan ditambahkannya nilai kontribusi komponen pengeluaran pemerintah untuk individu serta pengeluaran lembaga *non profit* yang melayani rumah tangga (LNPRT) ke dalam komponen pengeluaran konsumsi

pada tahun 2011 hingga mencapai sekitar 1,98 triliun pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan peningkatan peran pemerintah dan LNPRT dalam menopang perekonomian Sulawesi Barat yang dalam hal ini sifatnya transfer sosial. Hal ini juga berarti bahwa terdapat tambahan nilai nominal yang berasal dari pemerintah dan LNPRT yang dapat dinikmati oleh rumah tangga namun dalam bentuk tidak langsung (*indirect im-*

*pact*). Hasil ini mengkonfirmasi penelitian dari Barrientos (2008) yang menemukan bahwa dampak dari STIK yang dihasilkan dari pengeluaran konsumsi pemerintah dan LNPRT bagi rumah tangga adalah meningkatnya alokasi pengeluaran rumah tangga pada sumber-sumber pemenuhan kebutuhan namun sifatnya dinamis sebab transfer yang diterima *sharenya* bersifat relatif tergantung jumlah rumah tangga yang menikmati dalam perekonomian secara keseluruhan.

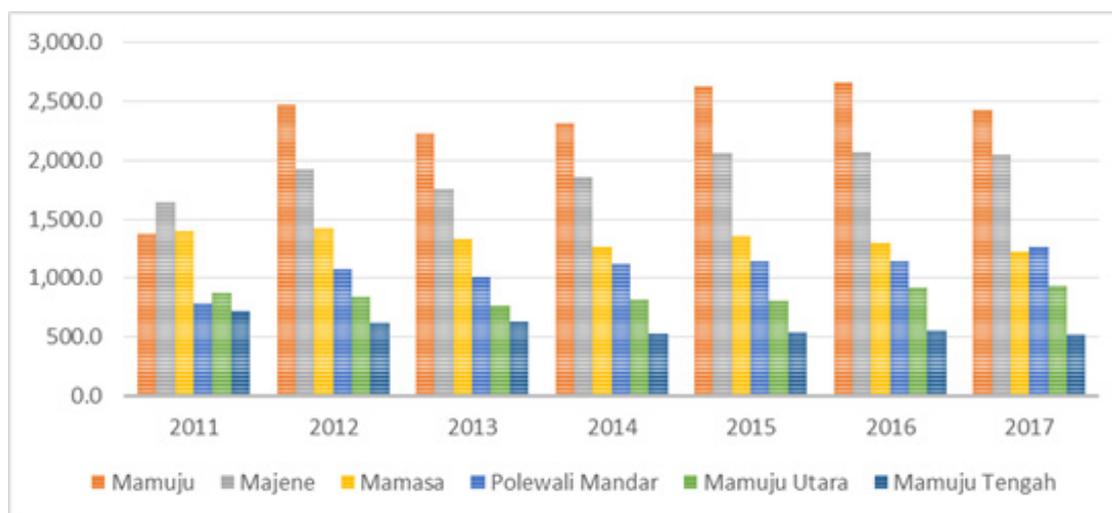
tingkat kontribusi pengeluaran pemerintah dan pengeluaran LNPRT dalam memberikan tambahan nilai PKRT secara tidak langsung di 3 (tiga) kabupaten tersebut adalah yang paling tinggi di Sulawesi Barat secara total. STIK dapat memberikan dampak berbeda di tiap wilayah bergantung kepada besar atau kecilnya level ekonomi suatu daerah yang dinilai dari beberapa indikator makro seperti PDRB tenaga kerja serta penduduk suatu wilayah.



**Gambar 1.**  
**Pengeluaran Konsumsi Akhir dan Social Transfer In Kind (STIK) Provinsi Sulawesi Barat menurut Kabupaten Tahun 2011-2017 (milyar rupiah)**

Jika dilihat dalam tinjauan yang lebih rinci menurut kabupaten, nilai total STIK paling tinggi yang dapat dinikmati sebagai tambahan pengeluaran rumah tangga berada di Kabupaten Mamuju dengan kisaran nilai antara 328,2-724,8 milyar rupiah, kemudian disusul oleh Kabupaten Polewali Mandar dengan kisaran nilai 316,3-549,1 milyar rupiah. Posisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Majene dengan nilai berkisar antara 253,6-345,9 milyar rupiah. Peringkat STIK tersebut bertahan sejak tahun 2011 hingga tahun 2017. Hal ini berarti

Selain secara total, nilai STIK juga dapat dianalisis lebih jauh dengan membentuk nilai perkapita atau membagi dengan total jumlah penduduk masing-masing kabupaten di tahun yang bersesuaian. Dari hasil nilai STIK tersebut, berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa pada tahun 2011 STIK perkapita tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Majene dengan nilai 1,65 juta rupiah perkapita disusul oleh Kabupaten Mamasa dengan nilai 1,4 juta rupiah perkapita dan kabupaten Mamuju dengan nilai 1,37 juta rupiah perkapita.



Gambar 2.

**Nilai Social Transfer In Kind (STIK) Provinsi Sulawesi Barat menurut Kabupaten Tahun 2011-2017 (ribu rupiah)**

Selepas itu, dalam rentang tahun 2012-2017 posisi STIK tertinggi beralih kepada Kabupaten Mamuju jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat. Nilai STIK Kabupaten Mamuju terus berada di atas level 2 juta rupiah perkapita pertahun hingga mencapai angka 2,42 juta rupiah perkapita di tahun 2017. Pada peringkat kedua ada Kabupaten Majene dengan nilai STIK 1,65 juta rupiah perkapita per di tahun 2011 kemudian meningkat menjadi 2,04 juta rupiah perkapita di yang memiliki tren yang terus meningkat yaitu dari 1,92 juta rupiah perkapita tahun 2012 menjadi 2,04 juta rupiah perkapita di tahun 2017. Cukup menarik Kabupaten Mamasa berhasil meningkat ke peringkat ketiga dengan nilai STIK terbesar jika ditinjau secara perkapita pada tahun 2011-2016. Dalam kurun waktu tersebut nilai STIK Kabupaten Mamasa berada di selang 1,26-1,42 juta rupiah perkapita. Peringkat Kabupaten Mamasa mulai tergeser pada tahun 2017 seiring dengan meningkatnya nilai STIK perkapita Kabupaten Polewali Mandar yang nilainya 2,07 juta rupiah perkapita pada tahun 2017.

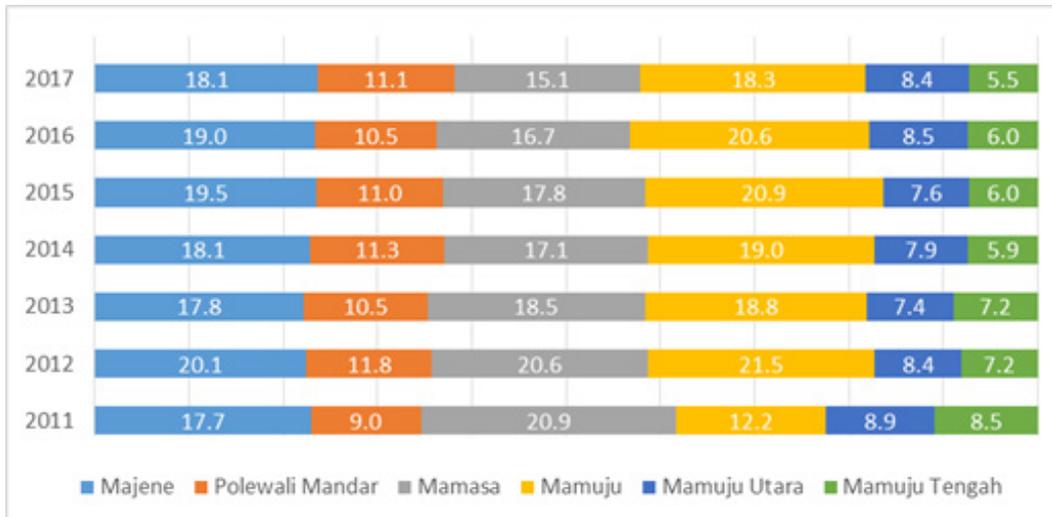
Hasil tersebut diatas semakin memperkuat temuan Tonkin (2013) yang meneliti STIK di wilayah *United Kingdom*.

Hasil tersebut menyimpulkan bahwa STIK sangat dapat dirasakan signifikan dampaknya pada wilayah-wilayah dengan resiko tingkat kemiskinan yang paling tinggi. Jika menilik data kemiskinan provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene adalah 4 kabupaten dengan kepemilikan kantong-kantong kemiskinan terbesar di Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam tinjauan yang lain, berdasarkan Gambar 3, jika melihat tingkat efisiensi STIK dalam mendorong PKRT akhir maupun PKRT perkapita masing-masing kabupaten, menariknya diperoleh hasil yang cukup berbeda bila dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Dari segi efisiensi, yang dihitung berdasarkan proporsi STIK total maupun perkapita terhadap total PKRT akhir maupun PKRT perkapita, Kabupaten Mamasa muncul sebagai peringkat ketiga menggantikan Kabupaten Polewali Mandar dalam jajaran 3 (tiga) Kabupaten dengan tingkat efisiensi tertinggi dalam mendorong PKRT dengan rata-rata sebesar 18,1 persen dari tahun 2011-2017. Peringkat pertama masih masih diduduki oleh Kabupaten Mamuju dengan rata-rata tingkat efisiensi dari tahun 2011-2017 sebesar

18,8 persen, disusul oleh Kabupaten Majene dengan rata-rata tingkat efisiensi 18,6 persen dalam kurun waktu yang sama.

luaran rumah tangga terbesar pada tahun 2011 berada di Kabupaten Majene dengan nilai sebesar 1,65 juta rupiah disusul oleh



Gambar 3.

**Proporsi Social Transfer In Kind (STIK) terhadap pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Akhir Provinsi Sulawesi Barat menurut Kabupaten Tahun 2011-2017**

**PENUTUP**

Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Total Nilai *Social Transfer in Kind* (STIK) hasil estimasi dengan menggunakan pendekatan pengeluaran Konsumsi Pemerintah khusus untuk konsumsi individu serta total pengeluaran konsumsi Lembaga *Non-Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) di Provinsi Sulawesi Barat berkisar antara 1,30-1,98 triliun rupiah pada tahun 2011-2017. Total nilai STIK tertinggi menurut kabupaten yang ada di Sulawesi Barat tahun 2011-2017 jika diurutkan dimiliki oleh Kabupaten Mamuju yang nilainya berkisar antara 328,22-724,80 milyar rupiah disusul oleh Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai STIK berkisar antara 316,29-549,15 milyar rupiah. Kabupaten Majene berada di posisi ketiga dengan nilai STIK total berkisar antara 253,58-345,86 milyar rupiah. Jika dinilai perkapita, kontribusi STIK dalam memberikan tambahan alokasi penge-

Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju dengan nilai masing-masing sebesar 1,4 juta rupiah dan 1,37 juta rupiah perkapita. Pada periode berikutnya yaitu Tahun 2012-2017 Kabupaten Mamuju menjadi Kabupaten dengan STIK terbesar yang nilainya berkisar antara 2,23-2,66 juta rupiah perkapita. Tingkat efisiensi STIK dalam memberikan kontribusi atau menopang perekonomian rumah tangga dengan menambah alokasi besaran pengeluaran rumah tangga yang dinilai dari besaran proporsi STIK terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) akhir yang terbesar dimiliki oleh Kabupaten Mamuju dengan rata-rata proporsi sepanjang tahun 2011-2017 sebesar 18,8 persen disusul oleh Kabupaten Majene dengan rata-rata proporsi sepanjang tahun 2011-2017 sebesar 18,6 persen serta Kabupaten Mamasa dengan rata-rata proporsi sebesar 18,1 persen. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat disampaikan bagi pemerintah adalah menggunakan alo-

kasi dana APBD dengan se-efisien mungkin pada daerah yang terdeteksi pemilik kantong-kantong kemiskinan yang tinggi. Bagi peneliti berikutnya agar mempertimbangkan nilai pajak tak langsung dalam mengestimasi nilai STIK.

*Measurement Of Economic Well-Being*, (Pp. 1–26).

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas nikmat yang Allah telah berikan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada istri tercinta atas semangat dan motivasinya, juga kepada Pak Endan Suwandana Ph.D serta Bu Anindita Diah, M.SR atas bimbingan, saran serta masukannya dalam penyelesaian tulisan ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitriani, Rusgiyono, A., & Wuryandari, T. (2013). Perhitungan Dan Analisis Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten/Kota Berdasarkan Harga Konstan (Studi Kasus Bps Kabupaten Kendal). *Jurnal Gaussian*, 2(2), 109–118.
- Persaulian, B., Aimon, H., & Anis, A. (2013). Analisis Konsumsi Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2), 1–23.
- Schwahn, F. (2014). Social Transfers In Kind And Economic Well-Being: Relevance, Implications And Possible Solutions. In *Paper Prepared For The Iariw 33rd General Conference* (Pp. 1–33).
- Stiglitz, J., Sen, A. K., & Fitoussi, J.-P. (2009). The Measurement Of Economic Performance And Social Progress Revisited: Reflections And Overview. *Sciences Po Publications*, 3–63.
- Tonkin, R., Antonopoulos, V., & Webber, D. (2014). Measuring Economic Well-Being In The Uk: Past Experiences And Future Challenges. In Iariw-Bank Of Korea Conference *“Beyond Gdp: Experiences And Challenges In The*